**Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi** e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 25, No 1 (2025): Februari, 439-442
DOI: 10.33087/jiubj.v25i1.5347

# Pengaruh Rasa Aman terhadap Moral Pajak Warga Negara Indonesia

**Dhiya Alfiyah Tarizah, Lili Erina, Ade Syahrudin, Katriza Imania**
Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya
Correspondence: dtarizah@gmail.com, lilierina@fisip.unsri.ac.id, adesyahrudinn@gmail.com; katrizaimania@fisip.unsri.ac.id

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana moral pajak penduduk Indonesia dipengaruhi oleh rasa aman. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder dari hasil survei situs World Value Survey (WVS) ke-7. Sebanyak 3.200 penduduk yang berusia sama atau lebih dari 18 tahun menjadi sampel penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa moralitas pajak penduduk dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh rasa aman mereka. Tingkat pendidikan merupakan salah satu elemen sosiodemografi yang secara positif dan signifikan mempengaruhi moralitas pajak; orang yang berpendidikan pasti akan memiliki moralitas pajak yang lebih tinggi.

**Kata Kunci:** rasa aman, moral pajak, tingkat pendidikan

***Abstract.*** *The aim of this research is to examine how the tax morale of the Indonesian population is influenced by a sense of security. This research uses quantitative methodology. The secondary data used is secondary data from the results of the 7th World Value Survey (WVS) site survey. A total of 3,200 residents aged the same or more than 18 years were the research sample. The research findings show that residents' tax morality is positively and significantly influenced by their sense of security. Education level is one of the sociodemographic elements that positively and significantly influences tax morality; Educated people will definitely have higher tax morality.*

***Keywords****: sense of security, tax morale, level of education*

## PENDAHULUAN

Keuangan negara, elemen yang paling substansial dan krusial, yang merupakan aspek fundamental dalam administrasi publik atau ilmu administrasi negara, menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini termasuk dalam ranah ilmu administrasi negara karena fokusnya pada keuangan negara yang merupakan dimensi utama dari administrasi negara. Pokok bahasan utama dalam keuangan negara adalah pajak, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan terpenting. Pajak diantisipasi untuk membiayai dan memfasilitasi operasi negara, menjadikannya topik utama dalam konteks administrasi publik yang lebih luas (Resmi, 2014).

Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa terakhir kali target pendapatan tercapai pada tahun 2008. Akibatnya, pendapatan pajak aktual tidak pernah mencapai target antara tahun 2009 dan 2020. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak sebagai salah satu taktik untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah meluncurkan program pengampunan pajak, yang juga disebut sebagai pengampunan pajak, untuk wajib pajak. Melalui inisiatif ini, aset yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang tidak diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) akan dihapuskan tunggakan pajaknya, dihapuskan sanksi administrasi pajak, dan dihapuskan sanksi pidana di bidang perpajakan. Sesuai dengan UU No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, hal ini dilakukan dengan cara membayar uang tebusan dan menghapus seluruh tagihan pajak yang belum dibayar.

Pemerintah menawarkan pengampunan pajak sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pendapatan negara. Hal ini juga menarik perhatian pada masalah yang lebih dalam, yaitu tingkat kepatuhan atau ketaatan pajak masyarakat yang secara umum masih rendah. Tindakan wajib pajak dalam menggunakan hak perpajakannya dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya dikenal sebagai kepatuhan pajak. Fakta bahwa wajib pajak perorangan dan badan usaha hanya menunjukkan kesiapan untuk membayar pajak ketika ada pengampunan menunjukkan rendahnya kepatuhan pajak di

kalangan masyarakat. Moral pajak, yang mengacu pada kesediaan masyarakat untuk secara sukarela mematuhi dan berkontribusi pada penyediaan komoditas yang dibutuhkan oleh negara, berkaitan erat dengan kepatuhan pajak (Luttmer & Singhal, 2014).

Hal ini dibuktikan dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu," jelas bahwa melindungi keamanan warga negara adalah hak asasi manusia. Sebagai bagian penting dari pendapatan negara, pajak mendukung inisiatif pemerintah untuk menjaga keamanan publik. Sebagai contoh, dana negara, yang dibiayai oleh pajak yang dibayarkan oleh warga negara, digunakan untuk membayar gaji polisi dan pemerintah. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab pemerintah dan perwakilannya untuk memastikan bahwa warga negara aman. Dasar pemikiran dari penelitian ini adalah bahwa orang akan lebih termotivasi dan secara moral cenderung untuk membayar pajak jika mereka percaya bahwa rasa aman mereka terjamin (Mardiasmo, 2019).

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara moralitas pajak penduduk dengan rasa aman yang mereka rasakan. Selain variabel-variabel independen tersebut, desain penelitian ini juga memasukkan data sosiodemografi sebagai variabel kontrol, seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Faktor-faktor ini akan diperhitungkan untuk menentukan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi korelasi antara persepsi warga negara tentang keamanan dan moralitas pajak.

## METODE

Metode penelitian ini mencakup subjek/bahan penelitian, peralatan yang digunakan, desain eksperimen atau rancangan penelitian, teknik pengambilan sampel, variabel yang akan diukur, teknik pengumpulan data, serta analisis dan model statistik yang diterapkan (Sunyoto, 2013). Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder, menurut Sugiyono (2019), merupakan sumber data yang tidak diberikan langsung kepada peneliti, melainkan diperoleh melalui perantara seperti orang lain atau dokumen. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh World Value Survey (WVS) pada gelombang ke-7. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan responden World Values Survey (WVS) di Indonesia selama tiga bulan (Juni, Juli, Agustus) pada tahun 2018, menggunakan teknik CAPI (computer-assisted personal interviewing). Data yang telah dikumpulkan oleh WVS dapat diunduh melalui situs web World Values Survey.

## HASIL

Tabel 1 menjelaskan bahwa dari sudut pandang variabel terikat (Y) mayoritas responden (87,37%) memiliki moral pajak yang tinggi, lalu dari sisi variabel bebas (X) responden pada penelitian ini memiliki ciri-ciri: Memiliki rasa aman yang tinggi (58,15%), berpendidikan SMA/Sederajat (56,64%), rata-rata berumur 40 (empat puluh) tahun dan mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (54,81%).

**Tabel 1**
**Analisis Univariat**

| Variabel Penelitian | Kategori | Frekuensi | % | n |
|---|---|---|---|---|
| Moral pajak warga negara (Y) | Rendah | 404 | 12,65 | 3193 |
| | Tinggi | 2.789 | 87,35 | |
| Rasa Aman (X1) | Rendah | 1.337 | 41,85 | 3.195 |
| | Tinggi | 1.858 | 58,15 | |
| Tingkat pendidikan (X2) | <SMA/Sederajat | 1.812 | 56,64 | 3.199 |
| | >SMA/Sederajat | 1.387 | 43,36 | |
| Umur (X3) | Mean | 40,02 | | 3.200 |
| | Standar Deviasi | 13,54 | | |
| | Min | 18 | | |
| | Max | 87 | | |
| Jenis kelamin (X4) | Perempuan | 1.754 | 54.81 | 3.200 |

Sumber: data olahan

Tabel 2 dapat diketahui bahwa analisis bivariat ini digunakan untuk menyaring variabel apa saja yang dapat diikut sertakan dalam analisis multivariat, dapat dilihat dari tabel di atas bahwa dari 4 (empat) variabel bebas yang ada, hanya 2 variabel bebas yang dapat diikut sertakan dalam analisis multivariat, dikarenakan dua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel terikat (Y), kedua variabel tersebut ialah variabel rasa aman (X1) dan tingkat pendidikan (X2). Lalu 2 (dua) variabel lainnya yang tidak dapat diikut sertakan dalam analisis multivariat ialah variable umur (X3) dan jenis kelamin (X4) hal ini dikarenakan kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel terikat (Y). Variabel dengan chi- kuadrat (X2) terbesar akan dimasukkan pada urutan pertama ke dalam analisis regresi logistik, diikuti oleh variabel dengan chi-kuadrat terbesar kedua dan seterusnya, dalam hal ini variabel tingkat pendidikan (X2) merupakan variabel dengan nilai chi-kuadrat tertinggi (88,39) lalu variabel rasa aman (X1) merupakan variabel dengan chi-kuadrat terbesar kedua (42,40).

**Tabel 2**
Analisis Bivariat

| No | Variabel terikat dan variabel bebas | $X^2$ | *p* | *V* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moral Pajak Warga Negara (Y) dan Umur (X3) | 0,16 | 0,69 | 0,00 |
| 2 | Moral Pajak warga negara (Y) dan jenis kelamin (X4) | 0,78 | 0,37 | 0,01 |
| 3 | Moral pajak wargan negara (Y) dan rasa aman (X1) | 42,40 | 0,00 | 0,11 |
| 4 | Moral pajak warga negara (Y) dan tingkat pendidikan (X2) | 88,39 | 0,00 | 0,16 |

Sumber: data olahan

Tabel 3 menunjukan sebagaimana tercermin dari angka Odds Ratio (OR), tingkat pendidikan (X2) menunjukkan kontribusi tertinggi (OR=313%) terhadap moralitas pajak (Y), sementara rasa aman (X1) juga memiliki kontribusi yang signifikan (OR=166%). Kedua variabel, tingkat pendidikan (X2) dan rasa aman (X1), menunjukkan tingkat signifikansi pada level p < 0,00 (sangat meyakinkan). Model regresi logistik final menunjukkan bahwa karakteristik warga negara dengan moralitas pajak tinggi adalah mereka yang memiliki pendidikan setinggi SMA/Sederajat dan merasakan tingkat keamanan yang tinggi (Palimbong & Tangdialla, 2021).

Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa rasa aman memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap moralitas pajak warga negara Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan rasa aman dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela, menciptakan motivasi intrinsik. Rasa aman, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara, dapat menjadi faktor kunci yang mendorong warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.Pentingnya rasa aman dalam konteks pembayaran pajak dapat dijelaskan dengan hubungan timbal balik antara kontribusi pajak yang diberikan oleh warga negara dan jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah. Gaji yang diterima oleh aparat dan pemerintah, sebagian besar berasal dari dana publik yang dihimpun melalui pajak.

Oleh karena itu, perlindungan dan jaminan rasa aman yang disediakan oleh pemerintah dianggap sebagai tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan warga negara. Dengan demikian, pemerintah dan aparat berwenang diharapkan untuk selalu siap memberikan perlindungan guna menjamin rasa aman warga negara Indonesia, seiring dengan kontribusi positif warga negara dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Penelitian ini didukung penelitian Setyawan (2014) dan Putro (2019) yang membuktikan bahwa rasa aman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat untuk menabung dan semangat karyawan dalam bekerja.

**Tabel 3**
**Analisis Multivariat**

| Tahapan Regresi Logistik | Variabel Terikat | Variabel Bebas | Level model | | | | | Level variabel | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | N | p | X2 | df | Pseudo R2 | Coef. | OR | P |
| 1. | Moral pajak warga negara (Y) | Tingkat pendidikan (X2) | 3.192 | 0,00 | 94,62 | 1 | 0,03 | 1,14 | 3,13 | 0,00 |
| 2. | Moral pajak warga negara (Y) | Tingkat pendidikan (X2) | 3.187 | 0,00 | 119,99 | 2 | 0,04 | 1,06 | 2,90 | 0,00 |
| | | Rasa aman (X1) | | | | | | 0,51 | 1,66 | 0,00 |

Sumber: data olahan

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan rasa aman terhadap moralitas pajak warga negara Indonesia, dengan memperhitungkan variabel sosio-demografis seperti tingkat pendidikan, umur, dan jenis kelamin. Namun, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara rasa aman dan moralitas pajak warga negara Indonesia ketika dikendalikan dengan variabel sosio-demografis (tingkat pendidikan, umur, dan jenis kelamin).

## DAFTAR PUSTAKA

Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. 2014. Tax Morale. *Journal of Economic Perspectives*, *28*(4), 149–168.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Penerbit Andi.

Palimbong, S. M., & Tangdialla, R. 2021. Analisis pemahaman mekanisme pajak dan moral pajak dalam mendorong kepatuhan pajak suka rela UMKM. *Forum Ekonomi*, *23*(4), 813–818.

Putro, G. S. 2019. Analisis Pengaruh Gaji, Kondisi Kerja, Rasa aman dan Promosi Terhadap Semangat Kerja. *Simak*, *17*(1), 1–17.

Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

Sunyoto, D. 2013. *Teori, Kuesioner, dan Proses Analisis Data Perilaku Organisasional. CAPS (Center For Academic Publishing Service).*

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Setyawan, Yohana N. 2014, Analisa Pengaruh Kepercayaan, Jaminan Rasa Aman, dan Aksesbilitas Terhadap Minat Menabung Nasabah Bank Danamon di Surabaya. *Jurnal Strategi Pemasaran*, 2(1), 1-8